



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 497167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.494.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 21500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 320.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 115.766.661

F. HARTA LAINNYA Rp. 175.000.000

Sub Total Rp. 3.104.766.661



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.104.766.661

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.